

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KOTA BOGOR

2.1 Sejarah KPP Pratama Kota Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor pada masa pemerintahan Belanda dulunya bernama “*De In Fiksi Van Financien*”, kemudian saat Indonesia merdeka nama tersebut berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan tak lama setelah itu menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada tahun 1984 terjadi reformasi pajak, dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak maka Kantor Inspeksi Pajak kembali berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tanggal 14 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Kantor Pelayanan PBB Bogor, dan Kantor Pemeriksaan Pajak Bogor disatukan menjadi KPP Pratama Bogor berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III.

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Bogor

KPP Pratama Bogor mempunyai visi dan misi yang menggambarkan tujuan dan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2.2.1 Visi KPP Pratama Bogor

Instansi pemerintah yang baik pasti memiliki visi untuk menjalankan kegiatan pemerintahnya. Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2.2.2 Misi KPP Pratama Bogor

Misi juga diartikan sebagai rumusan umum yang mengenai bentuk upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir serta strategi agar mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk mensukseskan suatu visi. Hal itu, misi disusun untuk memperjelas suatu langkah yang akan dilakukan dalam rangka untuk perwujudan visi.

Terkait visi di atas maka misi KPP Bogor adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Logo KPP Pratama Bogor

Berikut adalah contoh resmi logo dari KPP Bogor



Gambar 1 Logo DJP

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025)

Makna yang terdapat dalam logo Direktorat Jenderal Pajak menurut Pajak (2020), yaitu:

Bentuk

1. Bentuk bagian luar lebih rounded, melambangkan arti friendliness dan fleksibilitas.
2. Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan dan tegas. Dua bentuk identik ini di presentasikan oleh warna yang berbeda, menggambarkan keadilan yang di junjung tinggi oleh DJP. Bentuk secara keseluruhan menggambarkan arti bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan sangat (kuat).

Warna

Logo DJP mempunyai dua unsur warna diartikan dengan sinergi antara Wajib Pajak dan Fiskus; Warna Biru untuk DJP sementara Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.

Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang berpisah, yaitu pelayanan dan penegakan hukum pajak. Warna pada logo DJP tersebut memiliki arti, antara lain:

1. Emas: Kesejahteraan
2. Kuning: Kemitraan yang bersahabat
3. Biru: Profesionalisme
4. Biru Kehitaman: Ketegasan

2.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Bogor

KPP Pratama Bogor mempunyai beberapa tugas dan fungsi dalam bekerja, berikut ini merupakan tugas dan fungsi KPP Pratama Bogor.

2.3.1 Tugas KPP Pratama Bogor

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak

Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Fungsi KPP Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai fungsi :

1. Pelayanan pajak
2. Penyuluhan pajak
3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
7. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan
8. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan
9. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
10. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
11. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
12. Pemeriksaan pajak
13. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
14. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi merupakan susunan antara tiap bagian organisasi dan posisinya dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas dan fungsi berhubungan satu sama lain dan bagaimana pekerjaan terpisah satu sama lain.

KPP Pratama Bogor merupakan instansi yang memiliki fungsi dan tugas dengan tanggung jawab yang berbeda. Dari beberapa bentuk organisasi, KPP Pratama

Bogor menganut bentuk organisasi fungsional. Struktur fungsional biasa digunakan dalam bentuk perusahaan atau instansi dikarenakan adanya kelebihan lebih banyak dibandingkan dengan kelemahannya. Pembagian kinerja pada struktur fungsional ini sesuai dengan divisi kerjanya masing-masing. Kelebihan menggunakan struktur fungsional ini dapat menekankan biaya operasional, namun struktur organisasi fungsional ini memiliki kelemahan dalam penyampaian informasi antara divisi dan pelatihan, dan sebaliknya. Adapun struktur dari KPP Pratama Bogor sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi

Sumber: KPP Pratama Bogor

2.5 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor

Bagian ini menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Pegawai di KPP Pratama Bogor

2.5.1 Kepala Kantor KPP

Tugas dari kepala kantor meliputi kegiatan KPP Pratama secara keseluruhan, yaitu melakukan tugas penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (pemeriksaan serta penagihan).

2.5.2 Sub Bagian Umum

Tugas dalam melaksanakan tugas kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga merupakan bagian dari tugas Sub Bagian Umum.

2.5.3 Seksi Pelayanan

Seksi bertugas memberikan pelayanan bagi wajib pajak (WP) seperti melakukan penertiban produk hukum perpajakan, pelayanan perpajakan, penerimaan SPT dan surat permohonan Ekstensifikasi, serta kerjasama perpajakan.

2.5.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI bertugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan dokumen perpajakan, pencarian dan pengolahan data, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan teknis komputer, penyajian informasi perpajakan, pemantauan aplikasi, *e-SPT* dan *e-Filling*, serta melakukan penyiapan, percetakan dan pengiriman laporan kinerja.

2.5.5 Seksi Ekstensifikasi

Seksi ini memiliki tugas dalam pengolahan data dan penyajian informasi, penggalan potensi pajak, serta pembuatan monografi fiskal.

2.5.6 Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas melaksanakan kegiatan seperti penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan, pelelangan dan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

2.5.7 Seksi Pengawasan & Konsultasi I, II, dan III

Ketiga seksi tersebut mempunyai tugas yang sama. Sanksi Pengawasan & Konsultasi mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan WP, bimbingan dan himbauan kepada WP, Konsultasi teknis perpajakan kepada WP, Penyusunan Profil WP, analisis kinerja WP, serta rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi terhadap WP. Di KPP Pratama Bogor Seksi WASKON terbagi menjadi 3 (tiga) seksi. Pembagian tersebut berdasarkan kelurahan domisili WP, tetapi untuk WP besar pembagian dilakukan secara acak untuk setiap waskon tidak berdasarkan kelurahan. Dalam Seksi pengawasan dan konsultasi ini terdapat *Account Representative* yang menangani masalah tentang perpajakan dan berhubungan secara langsung dengan wajib pajak.